

KONDISI EKONOMI MASYARAKAT PETAMBAK PASCA IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MINAPOLITAN DI KABUPATEN GRESIK

Mochammad Rozikin

Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya Malang

Email: mochrozikin@ub.ac.id

Abstract: Gresik Regency has a large potential of capture fisheries and cultivation so that the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries is designated as a pilot of the Minapolitan project. This study aims to determine the impact of the implementation of the Minapolitan policy on the economic conditions of pond communities in Gresik Regency. The method used is qualitative descriptive with a focus of research: 1) efforts made by the government in implementing the Minapolitan policy; and 2) economic conditions of the pond community after the implementation of the Minapolitan policy. The results showed that the government had tried to improve infrastructure (infra-structure) around the ponds to make it easier for farm communities to run aquaculture activities, but had not been able to support the needs of production facilities. As for the economic conditions of the community, it has not significantly increased the income of the community and opened employment opportunities for the youth.

Keywords: Economic Condition, Farmers Community, Post-Implementation of Minapolitan Policy

Pendahuluan

Langkah Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah adalah mengejar pertumbuhan ekonomi dengan berusaha mengembangkan potensi yang dimiliki daerah, baik potensi SDMnya dengan ekonomi kreatifnya maupun potensi alam yang oleh Allah SWT disediakan untuk kemakmuran manusia. Dengan akal sehat dan keinginan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat maka diputuskan suatu kebijakan public oleh pemerintah, yaitu penetapan kawasan Minapolitan. Kebijakan publik pada intinya adalah sebagai pedoman untuk bertindak. Pedoman ini boleh jadi amat sederhana atau kompleks, bersifat umum maupun khusus. Anderson (1978) dikutip Abdul_Wahab (1997:14), mengemukakan bahwa, "*Public policies are those policies developed by governmental bodies and officials*". Kebijakan public merupakan keputusan yang diambil oleh pejabat pemerintah atau badan public untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Hal ini merupakan konsekuensi peran pemerintah sebagai regulator dan melaksanakan pembangunan. Pembangunan seringkali diidentikkan dengan pembangunan ekonomi, dengan maksud meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan ke seluruh masyarakat dan wilayah. Namun demikian, proses pembangunan tidak sepi dari

ketimpangan dilematis antara pertumbuhan ekonomi dengan pemerataan pendapatan. Untuk itu maka dikembangkan pembangunan ekonomi daerah berbasis potensi local, menurut (Koncoro, 2004:124) bahwa pembangunan daerah mengutamakan kerjasama arau kolaborasi seluruh stakeholder

Sudah menjadi rahasia umum bahwa potensi besar untuk Indonesia adalah perairan lautnya, sebab panjang garis pantainya 81.000 km dengan Luas wilayah perikanan di laut sekitar 5,8 juta Km², dengan luas 2,7 juta Km² sebagai perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Kondisi tersebut menjadi peluang bagi Indonesia untuk menjadikan sektor perikanan dan kelautan sebagai salah satu sektor yang sangat prospek dalam percepatan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional. Tingginya hasil produksi budidaya perikanan dan kelautan sejauh ini telah memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan ekonomi nasional. Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh Putra pada tahun 2010 menunjukkan bahwa sektor perikanan mampu memberikan kontribusi sebesar 82 miliar US\$.

Berdasarkan paparan FAO *Statistic Division* (2012:19), Produksi perikanan budidaya sampai dengan tahun 2007 berada pada urutan ke-4 dengan kenaikan rata-rata produksi 8,79% pertahun. Hal ini sangat berpotensi menjadi penghasil perikanan terbesar di dunia.

Perikanan merupakan salah satu sumber daya penting

bagi hajat hidup masyarakat dan memiliki potensi dijadikan sebagai penggerak utama (*prime mover*) ekonomi nasional. Hal ini didasari pada kenyataan bahwa: Pertama, Besarnya potensi perikanan Indonesia, baik ditinjau dari kuantitas maupun diversitas. *Kedua*, Industri di sektor perikanan memiliki keterkaitan dengan sektor-sektor lain dan mampu mengembangkan kesejahteraan wilayah sekitarnya. *Ketiga*, Perikanan Indonesia memiliki keunggulan komparatif (*comparative advantage*) yang tinggi (Daryanto, 2007).

Dalam rangka memperkuat sektor perikanan maka Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tahun 2010 mencanangkan untuk meningkatkan hasil produksi sektor perikanan tangkap dan budidaya dalam rangka mendukung terwujudnya Indonesia sebagai negara penghasil perikanan terbesar di dunia. Sebagai upaya pemerintah untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka pemerintah perlu mendorong percepatan pembangunan dan pengembangan ekonomi kelautan dan perikanan berbasis kawasan yang terintegrasi, efisien, dan berkualitas. Melalui Menteri Kelautan dan Perikanan pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Menteri Kelautan dan

Perikanan Nomor Per.12/MEN/ 2010 tentang Minapolitan, kemudian dilakukan tindak lanjut Penetapan Kawasan Minapolitan, telah ditetapkan 179 Kab./Kota Kawasan Minapolitan dengan jumlah lokasi sebanyak 202 yang terdiri dari Minapolitan Budidaya sebanyak 145 kab/kota dan Minapolitan Tangkap: 57 kab/kota berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 35 Tahun 2013.

Minapolitan merupakan konsep pembangunan berbasis manajemen ekonomi kawasan dengan motor penggerak di sektor kelautan dan perikanan. Sistem manajemen kawasan Minapolitan didasarkan pada prinsip integrasi, efisiensi, kualitas dan akselerasi tinggi. Program yang mulai dijalankan Pemerintah RI sejak 2009 ini merupakan upaya untuk merevitalisasi sentra produksi perikanan dan kelautan dengan penekanan pada peningkatan pendapatan rakyat.

Upaya peningkatan pendapatan rakyat tersebut memerlukan beberapa upaya dalam meningkatkan aktivitas kawasan Minapolitan diperlukan adanya penetapan struktur ruang Minapolitan. Konsep pengembangan struktur ruang di wilayah perencanaan adalah: Penetapan kawasan pusat perikanan dan pelayanannya (Minapolis). Wilayah yang dapat ditetapkan sebagai Sentra Minapolis adalah kawasan yang memiliki lokasi strategis dari segi ketersediaan infrastruktur maupun pemasaran dan pengolahan komoditi perikanan yaitu Kecamatan Sidayu (Masterplan

Kawasan Minapolitan Kabupaten Gresik, 2011).

Selain itu, diperlukan penetapan kawasan pendukung/*hinterland*. Kawasan ini dapat berupa sentra produksi budidaya perikanan tambak tawar, tambak payau maupun pusat perikanan tangkap laut. Wilayah yang ditetapkan sebagai kawasan *hinterland* adalah kawasan yang selama ini telah terdapat aktivitas budidaya perikanan tawar maupun payau yaitu Kecamatan Panceng, Bungah, Dukun dan Ujungpangkah.

Program Minapolitan yang diterapkan di Kecamatan Sidayu sejak tahun 2010, meskipun belum menunjukkan perkembangan secara signifikan, ternyata telah mampu memberikan kontribusi yang positif terhadap perekonomian masyarakat maupun daerah. Bupati Gresik Sambari Halim mengatakan bahwa : “Adanya program Minapolitan dapat meningkatkan jumlah produksi ikan yaitu sebesar 19.000 ton pada tahun 2011 serta industri rumahan yang dimiliki oleh petani tambak mampu menyerap tenaga kerja” (Kabar Bisnis. 2011).

Pembangunan kawasan berbasis potensi local merupakan lingkup pembangunan, pengembangan ekonomi local dimana stakeholder daerah (pemerintah daerah, swasta dan masyarakat) terlibat aktif dalam mendorong pertumbuhan lapangan kerja dengan meningkatkan aktivitas ekonomi di wilayah dimaksud, dengan beberapa kegiatan seperti penegmbangan kapasitas masyarakat, pembentukan

kelembagaan baru, inovasi untuk menghasilkan produk baru dan bermutu, serta pengembangan pasar dan identifikasi sarana produksi yang lebih banyak alternative pilihan dan harga terjangkau untuk produksi. Mardiyono (2014:36) menjelaskan bahwa pembangunan ekonomi local merupakan suatu proses dimana stakeholder pembangunan bekerja secara kolektif, bersama-sama dengan pola kemitraan baik sector pemerintah, swasta maupun masyarakat untuk mengembangkan suasana dianamis yang lebih baik bagi pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja dan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan dari pembangunan secara umum. Dalam prakteknya sangat mungkin dibentuknya kelembagaan baru sebagai wadah kolaborasi.

Radityo Pramoda, Armen Zulham, dan Yesi Dewita Sari (2013) yang menganalisis kebijakan penetapan Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) di daerah Bitung sebagai suatu kawasan Inti Minapolitan. Beberapa catatan yang dapat dikemukakan diantaranya yakni: 1) Dukungan pemerintah daerah terhadap PPS Bitung sebagai kawasan inti Minapolitan sudah diberikan dalam bentuk Surat Keputusan (SK) penetapan lokasi; 2) SK operasional pelaksana, alokasi anggaran, dan perencanaan pengembangan pembangunan fisik, 3) Kelembagaan yang sudah ada dan berfungsi sebagai pendukung program Minapolitan adalah: koperasi nelayan. 4) Dukungan pemerintah daerah

terhadap pembangunan pelabuhan, diaplikasikan dengan membuat kebijakan penetapan PPS Bitung sebagai pusat pendaratan ikan. Pihak manajemen pelabuhan sendiri, juga telah mengeluarkan kebijakan mengenai penjualan ikan dan pengelolaan limbah hasil perikanan. Sedangkan penelitian Adi Wiratama (2016) di kawasan Minapolitan Muncar Kabupaten Banyuwangi, menyimpulkan bahwa : 1) program Minapolitan kurang melibatkan penduduk local sebab kualitas SDM local kurang memenuhi standar keahlian yang dibutuhkan; 2) belum berhasil dalam rehabilitasi kerusakan pantai dan trumbu karang; 3) belum mampu meningkatkan kesejahteraan para nelayan; dan 4) pendidikan anak nelayan tergolong rendah sebagian besar pada pendidikan dasar.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka peneliti mendeskripsikan, menganalisis, dan menginterpretasikan : 1) usaha yang dilakukan oleh pemerintah dalam implementasi kebijakan minapolitan; dan 2) kondisi ekonomi masyarakat tambak pasca implementasi kebijakan minapolitan.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah diskriptif-kualitatif, dengan maksud untuk menampilkan fakta-fakta empiris secara naturalistik. Dengan focus penelitian yaitu: 1) usaha yang dilakukan oleh pemerintah dalam implementasi kebijakan minapolitan; dan 2) kondisi ekonomi masyarakat

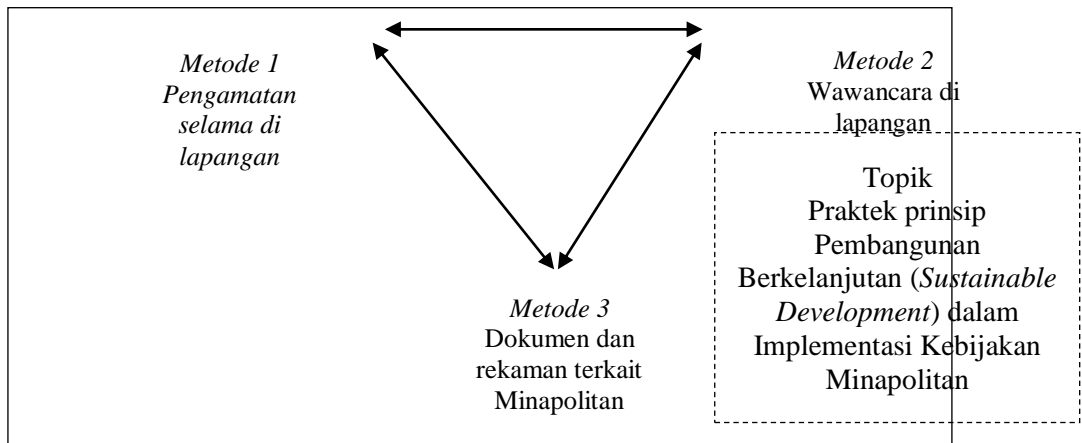
tambak pasca implementasi kebijakan minapolitan. Sedangkan situs penelitian ini yaitu Badan Perencanaan pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Gresik, Dinas kelautan, Perikanan dan Peternakan Gresik dan Kantor kecamatan Sidayu. Selain itu juga di kantor Kepala Desa yang terdapat di kawasan Minapolis Kecamatan Sidayu. Selama proses pengumpulan data di lapangan, peneliti telah melalui proses-proses dan prosedur yang relevan dalam penelitian yaitu: *Pertama*, memasuki lokasi penelitian (*getting in*); *kedua*, hubungan dengan subyek penelitian (*getting along*) dan *ketiga*, mengumpulkan data (*logging the data*). Dalam rangka mendapatkan data yang sesuai dengan fokus penelitian maka peneliti melakukan wawancara, pengamatan (observasi), dan dokumentasi. Kemudian data yang diperoleh dilapangan dianalisis menggunakan 5 langkah analisis data kualitatif yaitu, persiapan data, memahami data, interpretasi data, verifikasi data, dan menyajikan data.

Pada proses analisis data kualitatif ini menggunakan jalur konsep dan tidak menggunakan hipotesis dalam analisis data. Langkah pertama dalam pelaksanaan analisis data kualitatif di atas dimulai dengan kegiatan pengkodean dan kategorisasi data kualitatif yang diperoleh selama di lapangan. Dalam proses interpretasi data, peneliti terlibat dalam pengkodean analitik, apapun bentuk data yang diperoleh dilapangan, baik transkrip wawancara, catatan lapangan, dokumen, foto atau

video, peneliti perlu menentukan unit apa yang digunakan untuk pengkodean dan kategori data tersebut. Hal tersebut dimaksudkan bahwa peneliti memulai pemilihan data mentah menjadi kategori tertentu.

Sedangkan untuk melihat keabsahan data menurut Lincoln dan

Guba (1985:301-327), terdapat empat kriteria yang digunakan sebagai dasar pertimbangan keabsahan data dalam penelitian kualitatif yaitu, derajat kepercayaan (*credibility*), derajat keteralih (*transferability*), derajat ketergantungan (*dependability*), dan derajat kepastian (*conformability*).



Gambar 2 : Metode Pengumpulan Data, Denscombe (2007: 294)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejauh ini arah pembangunan yang terjadi di negara-negara berkembang termasuk dalam pembangunan di sektor perikanan lebih banyak yang mengedepankan nilai-nilai ekonomi sebagai tujuan akhir yang ingin dicapai dan menjadi tujuan dari pembangunan tersebut. Tetapi dalam perkembangannya pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan mengeluarkan suatu kebijakan yang berusaha untuk merubah pola dan paradigma pembangunan di sektor perikanan yang sebelumnya hanya mengedepankan nilai-nilai ekonomi,

sekarang menjadi pembangunan berkelanjutan, yaitu berusaha untuk menyeimbangkan dan menyatukan tiga aspek yang berbeda menjadi satu tujuan yang tidak terpisahkan. Hal ini sebagaimana yang tertuang di dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per.12/Men/2010 tentang Minapolitan.

Adanya peraturan tersebut di dasari atas pertimbangan bahwa dalam rangka mendorong percepatan pembangunan sektor kelautan dan perikanan perlu dilakukan pengembangan ekonomi kelautan dan perikanan berbasis kawasan yang terintegrasi, efisien, berkualitas,

dengan konsepsi Minapolitan. Oleh karena itu dalam pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan dengan konsepsi Minapolitan perlu dikembangkan kawasan Minapolitan untuk meningkatkan efisiensi dan mengoptimalkan keunggulan komparatif dan kompetitif daerah sesuai dengan eksistensi kegiatan pra produksi, produksi, pengolahan dan/atau pemasaran secara terpadu, holistik, dan berkelanjutan. Berkelanjutan yang dimaksud berarti pembangunan suatu kawasan Minapolitan perlu memperhatikan keseimbangan antara kegiatan ekonomi, memperhatikan aspek lingkungan, dan kesejahteraan sosial masyarakat.

1) Usaha Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Dalam Implementasi Kebijakan Minapolitan

Kebijakan Minapolitan merupakan kebijakan *top down* yang didasarkan hasil kajian tentang potensi daerah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.12/MEN/ 2010, pasal 7 tentang persyaratan kawasan minapolitan. Gresik ditetapkan sebagai kawasan minapolitan, sebagaimana disampaikan oleh Kabid Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan, bapak Samsul Arifin bahwa:

“Kabupaten Gresik pada tahun 2010 ditetapkan sebagai kawasan Minapolitan untuk

mendukung terwujudnya Indonesia sebagai negara penghasil ikan terbesar di dunia, penetapan Kabupaten Gresik sebagai kawasan Minapolitan membuat Dinas Kelautan, Perikanan, dan Peternakan kaget, hal ini dikarenakan jarak penetapannya hampir bersamaan dengan dikeluarkannya peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pedoman Minapolitan, padahal disana secara tegas diatur tentang syarat-syarat administrasi yang harus dipenuhi untuk menjadi kawasan Minapolitan, dan kami dari pihak pemerintah Kabupaten Gresik tidak pernah mengajukan, tiba-tiba ada Surat Keputusan Menteri yang menetapkan Kabupaten Gresik sebagai kawasan Minapolitan. Mungkin hal ini dikarenakan Gresik mempunyai tambak air payau yang bisa dikembangkan.” (Wawancara ,10/6/2013, di Dinas Kelautan, Perikanan, dan Peternakan Kabupaten Gresik).

Komitmen pemerintah Gresik ditunjukkan dengan adanya Surat Keputusan Bupati pada tahun 2011 tentang penetapan tim penyusun *masterplan* pengembangan kawasan Minapolitan. Kemudian tim melakukan pemetaan berdasarkan potensi wilayah dengan maksud untuk peningkatan produksi perikanan. Pusat pengembangan kawasan

Minapolitan di Kabupaten Gresik diarahkan di Kecamatan Sidayu, hal ini tidak terlepas dari kondisi Kecamatan Sidayu yang sangat memungkinkan untuk terjadinya proses pengembangan hasil produksi karena terdapat kegiatan budidaya seluas 2.800 Ha lahan tambak, kemudian juga didukung oleh kondisi masyarakat yang sebagian besar menjadi petani tambak. Komoditas unggulan menjadi aspek utama yang perlu diperhatikan, karena pada saat penetapan Kabupaten Gresik sebagai kawasan Minapolitan, terdapat kesepakatan dan penandatanganan kontrak komitmen antara Dinas Kelautan, Perikanan, dan Peternakan dengan Dirjen Budidaya Perikanan

Kementerian Kelautan dan Perikanan, bahwa Kabupaten Gresik harus mampu meningkatkan hasil produk unggulan budidaya perikanan tambak, khususnya Bandeng dan Udang Vaname.

Atas dasar kesepakatan itu maka pemerintah Kabupaten Gresik melalui Surat Keputusan Bupati Gresik Nomor: 523/283/HK/437.12/2011 menetapkan Desa Srowo, Sedagaran, dan Purwodadi, Kecamatan Sidayu sebagai kawasan minapolis dalam pengembangan kawasan Minapolitan di Kabupaten Gresik. Sedangkan untuk wilayah pendukungnya terdiri dari Kecamatan Bunga, Dukun, Ujungpangkah, dan Panceng. (Tabel 1)

Tabel 1 Rencana Penetapan Kawasan Minapolitan di Kabupaten Gresik

No	Fungsi Kawasan	Kecamatan	Luas Area (ha)		Arahan Kegiatan
			Desa	Luas	
1	Minapolis	Sidayu	1. Srowo	437	– Pemasaran – Pengolahan – Budidaya
			2. Sedagaran	132	
			3. Purwodadi	99	
			Sub Total	668	
2	Hinterland (Budidaya)	Sidayu	1. Randuboto	928	Sentra Budidaya (pembesaran)
			2. Ngawen	301	
			3. Mojoasem	214	
			4. Mriyunan	134	
			5. Raci Tengah	108	
			6. Raci Kulon	203	
			7. Golokan	212	
			Sub Total	2100	
		Ujungpangkah	1. Tanjung Awan	211	Budidaya (pembesaran)
			2. Karangrejo	121	
			3. Ketapang Lor	108	
			4. Pangkah Wetan	2415	
			5. Pangkah Kulon	1435	
		Sub Total	4290		
		Bungah	1. Abar-abir	45	Budidaya (pembesaran)
			2. Kemangi	285	
			3. Pegundan	91	
			4. Gumeng	247	

No	Fungsi Kawasan	Kecamatan	Luas Area (ha)		Arahan Kegiatan
			Desa	Luas	
			Sub Total	668	
		Dukun	1. Lowayu	99	Budidaya (pembesaran)
			2. Tebuwung	120	
			3. Madu Mulyorejo	90	
			4. Mentaras	81	
			5. Mojopetung	170	
			6. Ima'an	41	

Sumber: Masterplan Minapolitan Kabupaten Gresik, 2011

Untuk merealisasikan kebijakan ini dilakukan kegiatan normalisasi sungai dan perbaikan jalan produksi, sebagaimana diungkapkan oleh apak Samsul Arifin bahwa:

“Pada tahun 2012 pemerintah Kabupaten Gresik bekerjasama dengan kementerian dan Dinas PU telah merealisasikan pembangunan prioritas di Kecamatan Sidayu sebagai kawasan Minapolitan berupa normalisasi sungai dan perbaikan jalan produksi. Keberadaan program tersebut saat ini juga telah dirasakan oleh masyarakat khususnya para petani tambak, begitu juga dengan pelatihan baik di dalam kota maupun luar kota yang diadakan oleh balai penyuluhan dan Kementerian” (Wawancara ,10/6/2013, di Dinas KPP)

Pendapat di atas juga dibenarkan oleh Bapak Hakam, Ketua Forum Masyarakat Tambak Sidayu , bahwa:

“Saat ini pemerintah sedang menjalankan program pengembangan kawasan Minapolitan di Kecamatan Sidayu, yaitu membangun

normalisasi kali, jalan produksi, dan lain sebagainya jika itu sudah selesai, insyaAllah nanti bisa meningkatkan produksi. Kemudian pemerintah juga telah memberikan bekal kepada petani tambak melalui kegiatan-kegiatan pelatihan peningkatan SDM, bahkan saya terlibat langsung dan ikut mendampingi proses tersebut” (Wawancara , 1/7/2013, di Sekretariat FMTS).

Komitmen pemerintah Kabupaten Gresik pada kebijakan pembangunan infrastruktur dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia di kawasan Minapolitan sebagaimana yang telah di uraikan di atas, juga dapat dilihat dari beberapa program kerja yang telah disusun dan diarahkan untuk mendukung pengembangan kawasan Minapolitan di Kecamatan Sidayu pada tahun 2012, sebagaimana yang tertuang pada tabel 2 di bawah ini:

Tabel 2 Program Kegiatan Pembangunan di Kawasan Minapolitan Kabupaten Gresik Tahun 2012

No	Kebijakan	Lokasi	Volume	Satuan	Biaya (Rp.000)	Sumber Dana
1.	Sosialisasi dan Pembinaan di kawasan Minapolitan	Kab Gresik	1	Paket	100.000	APBD Kab
2.	Kebijakan Peningkatan Produksi Perikanan budidaya	Kab Gresik	1	Paket	1.500.000	APBN (TP)
3.	Normalisasi saluran air	4 Kecamatan	1	Paket	1.900.000	DAK
4.	Pembinaan dan pendampingan Kampung Vaname	Kecamatan Panceng dan Sidayu	1	Paket	PM	Swasta
5.	Peningkatan Jalan Produksi di Kawasan Minapolitan	Kab. Gresik	1	Paket	1.500.000	APBN
6.	Temu teknis dan Desiminasi Budidaya Bandeng	Kab. Gresik	1	Paket	PM	PM
7.	Demplot budidaya bandeng	Kecamatan Sidayu	1	Paket	PM	PM
8.	Penyusunan Dokumen Usulan Dukungan Penganganan Infrastruktur di Kawasan Minapolitan	Kecamatan Ujung Pangkah dan Sidayu	1	Paket	PM	PM
9.	Penyusunan DED Saluran Tambak	Ujung Pangkah dan Sidayu	1	Paket	PM	PM
10.	Penyusunan DED Jalan Produksi di Kawasan Minapolitan untuk tahun 2013	Kawasan Minapolitan	3	KM	PM	PM
11.	Operasionalisasi Excavator	Manyar	4	KM	Swaadaya	Masyarakat
12.	Temu aplikasi teknologi POS Penyuluhan Kelautan Perikanan dan Demplot Budidaya Bandeng	Golokan, Sidayu	1	Paket	PM	Pusluh
13.	Monitoring Penyakit Udang di Wilayah Minapolitan	Sidayu	1	Paket	PM	PM
14.	Pembangunan Balai Budidaya Multispesies	Panceng	1	Paket	1.052.000	APBD Kab. (DAK)
15.	Demplot Budidaya Perikanan	Kab. Gresik	1	Paket	99.000	APBD Kab
16.	IPTEKMAS	Cerme	1	Paket	PM	APBN

Sumber: Dinas Kelautan, Perikanan, dan Peternakan, 2012

Selain program pembangunan yang bersifat mendesak dan harus diprioritaskan, pemerintah Kabupaten Gresik juga telah menyusun kegiatan pendukung dalam pengembangan kawasan Minapolitan di Kabupaten Gresik. Pemerintah Kabupaten Gresik sangat berkomitmen untuk

mewujudkan tujuan Minapolitan secara program. Pemda Gresik berusaha memfasilitasi semaksimalnya sarana prasarana sebagai daya dukung dan peningkatan kemampuan para anggota kelompok petani tambak, sebagaimana disampaikan oleh Bpk

Samsul Arifin, yang juga dibenarkan oleh Bapak H. Suparlan selaku Mantan Kepala Desa dan Pengurus Pokdakan di Kecamatan Sidayu, yang menjelaskan bahwa:

“Pemda Gresik telah berupaya merencanakan untuk mendukung semaksimalnya program kawasan minapolitan ini. Jika dibaca dari rencana yang disusun ada 33 macam kegiatan, baik itu sifatnya fisik maupun soft skill untuk meningkatkan keterampilan pengolahan pasca panen, atau hasil tangkapan. Sungguh apabila rencana tersebut terlaksana maksimal

maka yang menjadi tujuan Minapolitan yaitu meningkatkan produktivitas hasil panen, dan membuka lapangan kerja sebanyak mungkin serta kesejahteraan masyarakat meningkat. Sebab minapolitan ini melibatkan banyak pihak serta saling terkait satu dengan lainnya, juga antar desa di kawasan minapolitan. “(Wawancara, 18/6/2015, di rumahnya).

Berikut dokumen rencana kegiatan pendukung pengembangan kawasan minapolitan oleh Pemda Gresik sebagai komitmen implementasi kebijakan minapolitan

Tabel 3 Rencana Kegiatan Pendukung Pengembangan Kawasan Minapolitan di Kecamatan Sidayu

No	Rencana Kegiatan
1	Normalisasi saluran air sungai Lengkong
2	Normalisasi saluran air sungai Celeng
3	Pembangunan pintu air di Muara Sungai Lengkong
4	Pembangunan pintu air di Muara Sungai Randuboto
5	Pelatihan budidaya ikan kerapu dan kakap
6	Pelatihan pembenihan ikan
7	Pelatihan dan Peningkatan pemberdayaan Kelembagaan perikanan budidaya POKDAKAN
8	Pembangunan Pasar Ikan Hygienis skala Minapolis
9	Pelatihan peningkatan penguasaan teknologi pemasaran dan sistem kerjasama
10	Penyediaan teknologi pengolahan limbah ikan (kulit udang/ikan/kepiting/tulang ikan)
11	Pelatihan Pembuatan Kerupuk
12	penyediaan alat pengolahan krupuk ikan/udang
13	Pengadaan alat pengolahan petis ikan/udang
14	Penyediaan sarana dan prasarana pengalengan disertai pelatihan SDM
15	Penyediaan coolbox bagi nelayan, pembudidaya dan pedagang ikan/udang
16	Pelatihan teknologi deversifikasi produk olahan modern ber bahan dasar ikan
17	Penyediaan cool room
18	Peningkatan jalan produksi ke tambak desa Srowo
19	Peningkatan jalan produksi ke tambak desa Ceret
20	Peningkatan jalan produksi ke tambak sekitar kali Celeng
21	Jalan produksi ke tambak Desa Racikulon

22	Jalan produksi ke tambak, Desa Golokan
23	Penyediaan sarana dan prasarana pengolahan limbah ikan/udang Minapolis
24	Pelatihan pengolahan limbah ikan dan udang
25	Pembangunan Pasar Ikan Hygienis skala Minapolis
26	Pelatihan peningkatan penguasaan teknologi pemasaran dan sistem kerjasama
27	Penyediaan teknologi pengolahan limbah ikan (kulit udang/ikan/keping/tulang ikan)
28	Pelatihan Pembuatan Kerupuk
29	penyediaan alat pengolahan krupuk ikan/udang
30	Pengadaan alat pengolahan petis ikan/udang
31	Penyediaan sarana dan prasarana pengalengan disertai pelatihan SDM
32	Penyediaan coolbox bagi nelayan, pembudidaya dan pedagang ikan/udang
33	Pelatihan teknologi deversifikasi produk olahan modern ber bahan dasar ikan
33	Penyediaan sarana dan prasarana pengolahan limbah ikan/udang Minapolis
34	Pelatihan pengolahan limbah ikan dan udang

Sumber: Dokumen Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) kawasan Minapolitan Kabupaten Gresik Tahun 2011-2015

Sepanjang tahun 2011 hingga 2014, pemerintah daerah telah berusaha untuk merealisasikan program-program yang bertujuan untuk meningkatkan hasil produksi dan pendapatan ekonomi masyarakat. Sepanjang tahun 2011 program yang telah direalisasikan di Kecamatan Sidayu adalah sebagai berikut:

- 1) Pembinaan dan Pengembangan Perikanan, berupa kegiatan utama dari program ini adalah rehabilitasi dan atau normalisasi saluran irigasi tambak sepanjang 0,65 Km di Desa Golokan
- 2) Demplot budidaya perikanan (vannamae), Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.66.730.000,- dengan kegiatan utama berupa : percontohan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) dengan komoditas udang vannamae

- 3) Pembangunan irigasi dan Pemeliharaan Saluran Irigasi (SI) Siraman, sebesar Rp.90.000.000,-
- 4) Pemeliharaan dan Rehabilitasi Embung dan Penampung Air Lainnya, berupa Pemeliharaan Waduk yang banyak digunakan sebagai salah satu sumber air untuk usaha perikanan budidaya di beberapa wilayah minapolis dengan anggaran 150.000.000
- 5) Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kegiatan ini dilaksanakan di beberapa ruas jalan di wilayah minapolis, hinterland, dan sentra budidaya ikan/udang untuk memperlancar transportasi hasil produksi budidaya dengan anggaran sebesar Rp.190.000.000 (Laporan pelaksanaan

kebijakan dan pengembangan kawasan Minapolitan, 2011)

Kemudian pada tahun 2012 melalui APBD Kabupaten Gresik, pemerintah kembali menggelontorkan anggaran untuk realisasi program berupa:

- 1) Pelatihan Teknologi Penanganan Produk Ikan Segar dengan anggaran sebesar Rp.50.000.000,
- 2) Pembinaan dan Pengembangan Perikanan, dengan anggaran sebesar Rp.1.965.983.000, untuk melakukan rehabilitasi/normalisasi saluran irigasi tambak di lokasi wilayah minapolis sepanjang 2,1 Km
- 3) Penyediaan bantuan bibit ikan/udang, Dianggarkan sebesar Rp.60.000.000,- dalam rangka mendukung pengadaan dan penyediaan bibit ikan di BBBMS
- 4) Pendampingan Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan, dengan anggaran sebesar Rp.60.000.000,
- 5) Fasilitasi Pembangunan Pasar Ikan dan Udang Hygienis dengan anggaran sebesar Rp.60.000.000, berupa kegiatan untuk menunjang persiapan rencana pembangunan pasar ikan/udang higienis dan modern
- 6) Pemeliharaan jalan produksi di Kecamatan Sidayu

(minapolis) dengan anggaran sebesar Rp.220.000.000

- 7) Pembinaan IKM (Industri Kecil Menengah) dalam memperkuat jaringan kluster Industri dan Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri di sentra IKM Krupuk ikan Desa Randuboto dengan anggaran sebesar Rp.44.838.000 (Laporan pelaksanaan kebijakan dan pengembangan kawasan Minapolitan, 2012)

Tidak hanya berhenti di tahun 2012, pemerintah Kabupaten Gresik pada tahun 2013 juga mengalokasikan anggaran untuk pengembangan kawasan Minapolitan melalui realisasi program yang terdiri dari :

- 1) Pengembangan Infrstruktur Balai Benih Budidaya Multispecies (BBBMS), dengan anggaran sebesar Rp.221.574.000,- Rehabilitasi Saluran Tambak, Dianggarkan sebesar Rp.2.368.914.000,- dengan kegiatan utama berupa rehabilitasi dan normalisasi saluran irigasi tambak sepanjang 21,257 Km.
- 2) Pelatihan Pembuatan Kemasan Produk Dianggarkan sebesar Rp.58.070.000
- 3) Fasilitasi Pembangunan Pasar Ikan Hygienis, Dianggarkan sebesar Rp.

100.000.000,- digunakan untuk menunjang koordinasi, penyusunan perencanaan dalam rangka persiapan pembangunan pasar ikan/udang higienis

- 4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Embung dan Penampung Air Lainnya. Total anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp.850.000.000.
- 5) Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai/Kali. Kegiatan utama berupa pemeliharaan saluran pembuang (SP) di beberapa wilayah minapolishinterland, dan sentra-sentra budidaya ikan/udang. Total anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp.3.595.836.000 (Laporan pelaksanaan kebijakan dan pengembangan kawasan Minapolitan, 2013).

Dari observasi lapangan dan wawancara dengan berbagai sumber lapangan maka dikemukakan komitmen pemerintah dalam pengembangan kawasan Minapolitan di Sidayu dapat disimpulkan :

- a) Keinginan pemerintah yang diagendakan dalam *masterplan* Minapolitan belum direalisasikan secara bertahap dan proposional, dan masih sebatas adanya kegiatan sosialisasi, pengerukan sungai dan pembangunan jalan produksi menuju tambak.
- b) Pengerukan sungai tidak sepanjang sungai yang ada di kawasan tambak dan

kedalamannya tidak memenuhi untuk sirkulasi air yang layak untuk kebutuhan tambak. Air belum terhindar dari pencemaran baik dari tambak maupun dari aliran muara sungai, dimana air merupakan kebutuhan utama untuk budidaya tambak.

- c) Pembangunan jalan sangat diperlukan untuk kelancaran pengangkutan sarana produksi tambak dan hasil panen, tapi pembangunan jalan yang ada cepat rusak dan tidak menjangkau akses jalan yang diperlukan petambak.
- d) Pengelolaan kawasan Minapolitan tidak dipercayakan kepada tim profesional tapi dijalankan oleh Tim Pokja yang dibentuk dengan SK Bupati, dimana Tim Pokja terdiri berbagai SKPD dengan harapan mereka ikut bertanggungjawab untuk mengawal tercapainya tujuan dan sasaran program Minapolitan. Tim Pokja yang terbentuk tersebut tugas utamanya adalah menjalankan tupoksi SKPD masing-masing yang telah ditetapkan secara baku sebelumnya, sehingga untuk program Minapolitan dijadikan *sambilan* bukan sebagai prioritas yang diutamakan.
- e) Komitmen pemerintah tidak terintegrasi mulai dari niat yang diagendakan dalam *masterplan* Minapolitan, janji-janji yang

- dipadatkan pada saat berhadapan dengan masyarakat, dan pelaksanaan di lapangan.
- f) Tidak adanya perubahan yang signifikan di kawasan Minapolitan Sidayu setelah adanya program Minapolitan maupun ditetapkan sebagai Minapolis dibandingkan sebelum ada kedua hal tersebut. Hal ini ditandai tidak ada perubahan dalam hal kebiasaan budidaya tambak yang tradisional, tidak ada peningkatan hasil produksinya maupun peningkatan kesejahteraan petambak dan masyarakat sekitarnya.
- g) Lemahnya komitmen pemerintah ini ditandai dengan : sikap setengah hati, *rok-rok asem*, *dok nyeng*, dan membuka peluang investor industrialisasi ke kawasan Minapolitan. Hal ini dapat mempengaruhi keberlanjutan program Minapolitan dan adanya kawasan Minapolitan.

2) Kondisi Ekonomi Masyarakat Tambak Pasca Implementasi Kebijakan Minapolitan.

Tujuan dari pelaksanaan kebijakan Minapolitan itu sendiri, sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.12/MEN/ 2010., yaitu: a) Meningkatkan produksi, produktivitas, dan kualitas produk kelautan dan perikanan; b)

Meningkatkan pendapatan nelayan, pembudidaya ikan, dan pengolah ikan yang adil dan merata; dan c) Mengembangkan kawasan minapolitan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di daerah. Sedangkan sasaran pelaksanaan Minapolitan sebagaimana yang diamanatkan di dalam Pasal 4 meliputi: (1) Meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat kelautan dan perikanan skala mikro dan kecil; (2) Meningkatkan jumlah dan kualitas usaha kelautan dan perikanan skala menengah ke atas sehingga berdaya saing tinggi; dan (3) Meningkatkan sektor kelautan dan perikanan menjadi penggerak ekonomi regional dan nasional.

Pembangunan perikanan sebagai bagian pembangunan ekonomi daerah, merupakan suatu proses kolaborasi, kemitraan antara stakeholder daerah dalam mengelola sumber daya perikanan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan suatu lapangan kerja baru. Sumbangsih sector Pertanian, Kehutanan, Perikanan terhadap PDRB masuk lima besar, yakni 1) Industri Pengolahan, 2) Perdagangan Besar dan Eceran, 3) Pertambangan dan Penggalian, 4) Konstruksi, dan 5) Pertanian, Kehutanan, Perikanan. PDRB sector Pertanian, Kehutanan, Perikanan lima tahun terakhir (2013-2017) dalam juta rupaiah yaitu: tahun 2013 sebesar 6.304.242,1; tahun 2014 sebesar 7.252.042,5; tahun 2015 sebesar 8.274.300,5; tahun

2016 sebesar 9.038.999,0; dan untuk tahun 2017 sebesar 9.809.404,9. Nilai PDRB ini tidak dipisahkan, tetapi bila dilihat dari potensi lahan yang ada maka bisa diurutkan pertanian lebih besar dibandingkan kehutanan dan perikanan, dan perikanan lebih besar daripada kehutanan.

Menurut Bapak Tamam, sejauh ini keberadaan program Minapolitan sudah nampak dan bisa dirasakan oleh masyarakat, khususnya untuk kegiatan normalisasi sungai dan jalan produksi. Hal ini sebagaimana pernyataannya di dalam kutipan wawancara berikut ini:

“secara kemanfaatan masyarakat mulai merasakan dengan dibangunnya jalan akses tambak, sekarang kan di paving, dulunya sebelum di paving ketika udang sudah berumur dua bulan, terus musimnya tidak mendukung misalnya musim hujan pakai sepeda motor tidak bisa di pematang tambak, sekarang sudah ada pavingnya malam-malam kesana bisa, jadi ketika udang sudah berumur 2 bulan petani sudah bisa *standby* disitu, dalam artian memantau ketika jam 12 malam jika udang ada masalah sudah siap panen” (Wawancara , 20 /7/ 2014, di rumah Bapak Tamam)

Menanggapi pernyataan di atas, Bapak Samsul Arifin juga menjelaskan, bahwa:

“Komitmen pemerintah daerah sangat besar terhadap

upaya peningkatan hasil potensi disektor perikanan khususnya untuk kawasan Minapolitan, bayangkan saja dulu sebelum adanya Minapolitan tidak ada kepedulian pemerintah untuk melakukan normalisasi sungai, irigasi apalagi membangun jalan produksi, tetapi saat ini sarana tersebut ada ditambah lagi dengan bantuan bibit dan pelatihan yang selalu diberikan oleh pemerintah. Bahkan saat ini sudah bisa dirasakan manfaatnya oleh petani, tidak perlu susah lagi ketika ketambak dan hasil produksi terus meningkat sepanjang tahunnya” (Wawancara , 10/6/2014, di kantornya).

Sejalan dengan pernyataan di atas, Bapak Zaini juga menjelaskan bahwa keberadaan kebijakan Minapolitan di Kecamatan Sidayu sejauh ini telah memberikan manfaat bagi para petani. Hal ini sebagaimana yang dituangkan di dalam kutipan wawancara berikut ini:

“Sepengetahuan saya angka hasil produksi terus meningkat untuk Bandeng dan Udang di Kabupaten Gresik sepanjang tahun 2011-2014, terutama karena mendapatkan dukungan dari Minapolitan, termasuk dukungan bibit dari pemerintah. Tetapi yang terpenting dan benar-benar terasa bagi petani adalah

kemudahan dengan lancar saluran sungai dan juga adanya jalan produksi. Sejak dulu itu yang diharapkan

tetapi baru terealisasi". (Wawancara , 11/6/2014, di kantornya)

Tabel 4 Produktitas Hasil Budidaya Tambak di Kabupaten Gresik

No	Komoditas	2011		2012		2013		2014*	
		Taget (Ton)	Realisasi (Ton)	Taget (Ton)	Realisasi (Ton)	Taget (Ton)	Realisasi (Ton)	Taget (Ton)	Realisasi (Ton)
1	Bandeng	28.400	28.428,054	29.800	53.181,257	32.370	68.811,44	34.365	50.879,60
2	Udang Vannamae	3.529	4.585,89	3.874	8.117,589	3.970	7.160,62	4.080	6.985,70
3	Udang Windu	1.113	2.093,34	1.420	3.406,238	1.765	4.005,80	1.873	4.505,80
Total		33.042	35.107	35.094	64.705,084	38.105	79.977,86	40.318	62.371,1

Sumber: Dinas Kelautan, Perikanan, dan Peternakan Kab.Gresik, 2014

Jika dilihat secara kuantitatif sepanjang tahun 2011 hingga pertengahan tahun 2014 hasil produksi budidaya bandeng, udang vannamae, dan udang windu di Kabupaten Gresik memang terlihat peningkatan yang signifikan antara target yang ditetapkan dengan kenyataan yang ada. Kendatipun demikian, peningkatan hasil produksi tersebut bukan suatu prestasi yang bisa dibanggakan oleh pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan angka produktifitas tersebut merupakan angka secara keseluruhan di Kabupaten Gresik, bukan semata-mata hasil produktifitas yang ada di kawasan minapolis dan hinterland Minapolitan di Kabupaten Gresik. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Zainul dalam kutipan wawancara di bawah ini:

"Mulai tahun 2009 hingga saat ini kondisi tambak di kawasan Sidayu dan sekitarnya produktifitasnya terus menurun, dan ini tidak diperhatikan oleh

pemerintah, jika ternyata tiba-tiba data dari pemerintah menunjukkan hasil yang baik maka itu bukan hasil dari Kecamatan Sidayu dan sekitarnya, karena kesuburan tanahnya semakin menurun mana mungkin produktifitasnya meningkat. Bahkan saya yakin itu bukan dari Sidayu dan sekitarnya karena sebenarnya pemerintah tidak memiliki data yang rinci perkecamatan. Jika angka produktifitas meningkat maka saya tidak akan kesusahan untuk mencari suplai perusahaan Minalaut" (Wawancara , 20/7/2014, di ruang rapat PT. Kelola Mina Laut).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Prasita pada tahun 2013 juga menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2010 hingga tahun 2013 terjadi trend negatif untuk angka produksi Bandeng, Udang Vannamae, dan Udang Windu untuk kawasan

tambak di wilayah Kecamatan Ujungpangkah, Panceng, dan Sidayu yang merupakan wilayah pengembangan kawasan Minapolitan. Hal ini dikarenakan sepanjang tahun tersebut terjadi penurunan angka

produksi untuk komoditas Bandeng, Udang vannamae maupun udang windu di Kecamatan Sidayu sebagaimana yang bisa dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 5 Angka Produktifitas Hasil Budidaya Tambak di Kecamatan Sidayu

Tahun Produksi	Angka Produktifitas (Komoditi Bandeng, Udang Vannamae, dan Udang Windu)
2010	5.142,47 ton
2011	4.168,62 ton
2012	3.817,20 ton
2013	3.219,45 ton

Sumber: Prasita, 2013

Atas hasil penelitian sebagaimana yang tertuang di dalam tabel di atas semakin menunjukkan bahwa angka produktifitas budidaya tambak di Kecamatan Sidayu setiap tahunnya semakin menurun, jika dibandingkan dengan data yang dirilis oleh Dinas Kelautan, Perikanan, dan Peternakan, maka kontribusi hasil produktifitas budidaya tambak di Kecamatan Sidayu, sebagai kawasan Minapolitan hanya 10% dari total produktifitas se Kabupaten Gresik. Kondisi sangat memprihatinkan karena implementasi kebijakan Minapolitan di Kecamatan Sidayu sejauh ini belum mampu memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan produksi. Minimnya kontribusi kebijakan Minapolitan terhadap peningkatan produksi Bandeng, Udang Vannamae, dan Udang Windu di Kecamatan Sidayu juga dirasakan oleh Bapak H. Suparlan yang menjelaskan bahwa:

“Produksi bandeng, udang semakin tahun semakin menurun, karena kondisi lahan yang semakin menurun kesuburannya, selain itu juga masalah yang dari dulu belum selesai adalah permasalahan bibit, sejauh ini bibit super sulit untuk didapatkan dan pemerintah tidak pernah mencarikan solusi atas permasalahan tersebut mulai dari dulu maupun sekarang ada Minapolitan, bahkan yang dilakukan oleh pemerintah juga kurang bisa dirasakan termasuk pembangunan sungai itu juga belum bisa mengatasi masalah kekurangan air. Jika kondisi tersebut terus berjalan sampai sekarang maka produktifitas tidak akan pernah berkembang” (Wawancara , 21/7/2014 ,di rumah Bapak H. Suparlan)

Sejalan dengan pernyataan di atas, Bapak H. Muslikh juga menjelaskan bahwa:

“Upaya pemerintah terkesan setengah hati dan formalitas, selain tidak melibatkan Pokdakan juga apa yang dilakukan tidak ada pengaruhnya terhadap peningkatan produksi. Malah banyak yang gagal ketika kita menggunakan apa yang disarankan oleh pemerintah. Bahkan saat ini banyak Pokdakan yang tidak percaya pemerintah karena apa yang disampaikan dengan prakteknya tidak mempengaruhi peningkatan produksi, malah banyak yang gagal” (Wawancara , 21/7/2014 ,di rumahnya).

Berdasarkan uraian di atas, dapat difahami bahwa sejauh ini keberadaan kebijakan Minapolitan di Kecamatan Sidayu belum mampu memberikan dampak signifikan dan mendorong adanya peningkatan hasil produksi untuk komoditas Bandeng, Undang Vanamei, dan Undang Windu. Selain itu yang paling penting dan tidak bisa dipisahkan dari persoalan ini adalah sistem budidaya yang digunakan oleh sebagian besar petani di Kecamatan Sidayu adalah menggunakan sistem tradisional. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Prasita pada tahun 2013 yang menjelaskan bahwa hampir 60% tambak di Kabupaten Gresik menggunakan metode tradisional, khususnya di

Kecamatan Sidayu 80an % menggunakan metode tradisional, sehingga tingkat produksinya tidak bisa sebanyak tambak yang menggunakan sistem insentif dan semi insentif.

Sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Prasita, Bapak H. Muhammad Sokeh juga membenarkan bahwa sebagian besar tambak di Kecamatan Sidayu menggunakan sistem tradisional.

"Pengolahan tambak secara tradisional menurut yang saya amati adalah lebih bisa bertahan keberlanjutannya daripada yang intensif. Hal ini karena bagi petani tambak udang vanamei tidak harus mengikuti ukuran tertentu yang disyaratkan oleh eksportir udang dan ikan, tetapi apabila dia merasaeliharaan udangnya sudah cukup dapat harga (misal 2 bulan saja) maka dipanenlah sehingga biaya-biaya operasional maupun lainnya dapat tertutupi. Memang tidak sebesar kalau dibudidayakan secara intensif yang memerlukan dukungan modal dan teknologi serta keterampilan tambahan. Hal tersebut pernah dilakukan oleh petambak yang menyewa tambak sebelah utara jalan utama , meraka awalnya sangat berhasil , tetapi setelah berlangsung empa tahunan maka bangkrut. Sedangkan dengan

cara tradisional mereka mampu bertahan" (Wawancara pada tanggal 23/7/2014 ,di rumah Bapak H.Sokeh)

Pernyataan Bapak H. Muhammad Sokeh juga dibenarkan oleh Bapak H. Muslikh yang menjelaskan bahwa:

"Banyak petani yang lebih memilih menggunakan sistem tradisional karena lebih bisa bertahan jangka panjang dibandingkan intensif, tetapi hasil produksinya lebih sedikit dan kadang pas-pasan ketika panen, karena memang itu kondisinya yang tidak bisa dihindari, apapun hasilnya petani masih bertahan dengan sistem tradisional". (Wawancara , 21/7/2014 ,di rumah Bapak H. Muslikh)

Banyaknya petani tambak yang menggunakan sistem tradisional dalam proses budidaya juga dibenarkan oleh Bapak Samsul Arifin. Kendatipun demikian juga masih ada petani yang menggunakan sistem semi intensif maupun insentif dalam proses budidaya. Hal ini sebagaimana pernyataannya di dalam kutipan wawancara berikut ini:

"Di Gresik lebih kurang dari 90% sebagai petambak tradisional, dan sebagian besar tidak monokultur (hanya udang saja) tetapi multikultur (udang dan bandeng). Panen udang (2-3

bulan) tidak *disat* airnya, tetapi hanya *diseser* saja untuk diambil udangnya karena bandung dipanen pada umur 8 bulan. Kemudian dimasuki lagi glondongan udang, demikian seterusnya. Coba dianalisis hasilnya maka tentu menguntungkan untuk petambak. Tetapi juga ada yang menggunakan semi maupun intensif. Kalau secara intensif maka hanya monokultur yakni budidaya udang vanamiei saja, karena harga pasarnya cukup menarik dan untuk itu diperlukan biaya tambahan, tetapi untuk proses pengolahannya membutuhkan teknologi yang memadahi agar bisa bertahan dan tidak merusak lingkungan". (Wawancara , 10/7/2014,di kantornya).

Masih adanya petani tambak yang menggunakan sistem semi-intensif dan insentif dalam proses budidaya tambak di Kecamatan Sidayu, dikarenakan secara jumlah produksi terdapat perbedaan yang signifikan antara yang dihasilkan oleh pembudidaya tambak yang menggunakan sistem tradisional dengan yang menggunakan sistem semi-intensif maupun intensif. Berdasarkan fakta tersebut perlu kiranya ada perubahan sistem budidaya tambak dari yang tradisional menjadi modern. Hal ini dikarenakan jika petani tambak di Kecamatan Sidayu masih bertahan

dengan sistem tradisional, dan tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah untuk mengembangkan sistem tambak modern dengan pendekatan teknologi dan pengetahuan yang memadai maka, sulit kiranya masyarakat akan merasakan dampak yang signifikan dari keberadaan kebijakan Minapolitan di Kecamatan Sidayu. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Zainul dalam kutipan wawancara berikut ini:

“Melihat hasil produktifitas yang semakin menurun saya rasa perlu adanya perubahan dalam proses budidaya tambak yang tradisional menjadi modern, pemerintah tidak bisa tinggal diam saja jika memang peduli pada kebijakan Minapolitan, karena jika tetap bertahan dengan sistem tradisional tanpa adanya intervensi dari pemerintah untuk meningkatkan pengetahuan petani dan teknologi yang ramah lingkungan, karena kondisi tambak walaupun tradisional sudah mulai tercemar, bibit semakin sulit dan juga tidak mampu memberikan hasil produksi yang signifikan. Jika ini terus terjadi maka jangan berharap banyak dengan kebijakan Minapolitan. Selain itu yang tidak kalah pentingnya, adanya kebijakan kan diharapkan mampu mensejahterakan rakyat,

tetapi saat ini saya rasa belum terjadi”. (Wawancara , 20/7/2014, di ruang rapat PT. Kelola Mina Laut)

Pendapat di atas, juga dibenarkan oleh Bapak H. Suparlan yang mengatakan bahwa, jika diukur secara ekonomi memang penghasilan yang didapatkan oleh petani tambak tidak sebanding dengan apa yang dikeluarkan khususnya bagi petani tambak tradisional karena hasil produksinya tidak signifikan. Seharusnya pemerintah dengan adanya kebijakan Minapolitan membawa angin segar kepada petani untuk memberikan fasilitas produksi termasuk bantuan modal sehingga petani bisa bertahan. Hal ini sebagaimana yang diutarakan di dalam kutipan wawancara berikut ini:

“Kondisi saat ini tidak sama dengan kondisi zaman dulu, banyak petani tambak yang gulung tikar dan beralih profesi, karena apa yang dihasilkan dengan modal yang dikeluarkan tidak sebanding. Adanya kebijakan dari pemerintah juga tidak bisa membawa angin segar dan memfasilitasi petani maupun pengusaha tambak untuk penyediaan bibit unggulan maupun modal. Karena selama ini banyak yang gulung tikar dan pindah profesi disebabkan modal”. (Wawancara , 21/7/2014, di rumah Bapak H. Suparlan)

Banyaknya petani tambak yang beralih profesi, terutama yang menggunakan sistem sewa dikarenakan sejauh ini mereka dengan menggunakan sistem tradisional selalu rugi dan yang untung hanya pemilik lahan, karena biaya produksi mahal dan hasilnya tidak seimbang. Sedangkan untuk mendapatkan hasil dan keuntungan yang maksimal, maka para petani harus beralih dari sistem tradisional ke sistem semi-insentif dan insentif. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Bapak H. Muslikh dalam kutipan wawancara berikut ini:

“Petani yang bertahan biasanya memang yang memiliki lahan tambak sendiri dan itupun menggunakan cara tradisional, tetapi untuk yang sewa pasti banyak ruginya karena antar biaya sewa dan penghasilan tidak seimbang. Seperti di Sidayu ini yang banyak sewa sehingga kalau mau untung harus menggunakan cara modern. Tapi untuk cara modern juga membutuhkan modal yang besar dan teknologi, disatu sisi kesulitannya masyarakat adalah tidak ada modal dan pemerintah tidak banyak membantu. Itu yang saat ini dirasakan oleh petani di sini, sehingga banyak juga yang alih ke profesi lain karena dianggap lebih menguntungkan dibandingkan tetap di tambak” (Wawancara , 21/7/2014, di rumahnya)

Kondisi tersebut sangat ironis untuk masa depan kebijakan Minapolitan di Kecamatan Sidayu. Hal ini dikarenakan keberadaan kebijakan Minapolitan diharapkan mampu memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat dan masyarakat sekitar, tetapi yang terjadi malah sebaliknya. Selain permasalahan minimnya jumlah produksi, dan tingginya biaya produksi sehingga berdampak pada penurunan secara ekonomi bahkan banyak yang meninggalkan profesi tersebut, juga terdapat permasalahan yang sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat, yaitu aspek pasar. Keberadaan pasar sangat penting untuk mendukung keberlangsungan dan kehidupan petani, tetapi sejauh ini pemerintah masih belum mampu memfasilitasi keberadaan pasar. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak H. Suparlan dalam kutipan wawancara di bawah ini:

“Sebenarnya persoalannya bukan hanya masih minimnya hasil produksi dan tingginya biaya produksi, tetapi ada persoalan lain yang itu sangat berhubungan dengan aspek ekonomi, yaitu persoalan pasar. Sejauh ini kita masih kesulitan untuk memasarkan karena pemerintah belum menyediakan pasar khusus komoditas inti kawasan minapolitan. Sehingga untuk proses penjualan kurang sehat dan selalu dilakukan

ditambah oleh pedangan ikan atau tengkulak. Kalaupun toh kita mau menjual kepasar itu membutuhkan waktu dan biaya lagi karena lokasinya jauh. Sudah biaya tinggi untuk produksi untuk menjualnya juga masih butuh lagi. Seharusnya ini mendapatkan perhatian dari pemerintah". (Wawancara , 21/7/2014, di rumahnya).

Kondisi yang dirasakan oleh petani mengenai aspek pasar sebenarnya telah dirasakan oleh pemerintah. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Samsul Arifin di dalam kutipan wawancara di bawah ini:

"Sejauh ini kami sudah berusaha untuk memfasilitasi pasar, bahkan saat ini sedang membangun pasar untuk mempermudah proses pemasaran bagi para petani tambak. Bahkan kami sudah merencanakan untuk melakukan kerjasama bermitra dengan perusahaan pengelolaan hasil tambak seperti PT. Kelola Mina Laut untuk memasokkan hasil budidaya tambak, sehingga petani tidak lagi merasa kesulitan pasar sambil menunggu pasar yang dibangun selesai". (Wawancara , 10/7/2014, di kantornya).

Kendatipun secara produksi, jumlah yang dihasilkan oleh pembudidaya tambak di Kecamatan Sidayu dianggap masih rendah dan jauh

dari harapan sebagaimana yang menjadi tujuan Minapolitan, namun pemerintah tidak mengakui bahwa keberadaan kebijakan Minapolitan tidak mampu memberikan pengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat. Hal ini dikarenakan berdasarkan pandangan yang disampaikan Bapak Samsul Arifin dalam kutipan wawancara berikut ini:

"Harus diakui bahwa bertambak lebih menguntungkan daripada bertani, hal ini didukung oleh adanya tambak-tambak baru yang dulunya lahan sawah pertanian. Harus hati-hati melihat fenomena di lapangan, bahwa sesungguhnya orang-orang yang punya tambak tidak ada yang miskin karena jika dia tidak menggarap tambaknya maka disewakan dan itu sudah menghasilkan uang sebagai pendapatan dia. Berbeda kalau dia penyewa maka dia berusaha semaksimalnya agar dapat keuntungan. Saya punya teman yang budidaya tambaknya tidak terlalu mengambil resiko dengan keuntungan tinggi yaitu budidaya udang vanamei". (Wawancara , 10/7/2014, di kantornya)

Pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Samsul Arifin, merupakan kondisi yang terjadi sebelum adanya kebijakan Minapolitan, dan bertolak

belakang dengan kondisi yang terjadi di lapangan pada saat ini. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak H. Sokeh dalam kutipan wawancara di bawah ini:

“Kalau dulu boleh bilang petani tambak itu sukses karena lahan memang masih subur, dipaksakan untuk intensif masih sangat mungkin belum ada limbah industri. Tapi saat ini kondisi produksi tambak itu semakin menurun karena lahan tambak yang sudah tidak subur lagi, bahkan untuk digunakan sistem intensif sudah tidak mungkin dan malah mati dan gagal, sehingga banyak yang bertahan dilahannya masing-masing tapi pakek tradisional. Tau sendiri kalau tradisional itu keuntungannya cuma sedikit dibandingkan dengan dengan yang sebelumnya pake intensif atau cara-cara yang modern itu”.
(Wawancara ,23/7/2014,di rumahnya)

Kemudian Bapak Bapak H. M Sokeh juga menjelaskan bahwa, banyaknya petani tambak yang beralih profesi kepada pekerjaan lain karena menjadi pegawai diperusahaan itu lebih diuntungkan dibandingkan dengan menjadi petani tambak untuk saat ini.

“Saat ini sudah banyak yang tidak lagi menjadi petani tambak, banyak yang alih profesi kepekerjaan lain, bahkan tidak adalagi turun

menurun seperti dulu anaknya banyak yang tidak mau jadi petani tambak karena kurang menguntungkan jika dibandingkan dulu. Kalau terlihat kaya itu karena prosesnya dari dulu bukan baru-baru sekarang saja. Bahkan saat ini sudah banyak lahan-lahan tambak milik petani di sini yang dijual kepada investor termasuk punya keluarga saya, karena sudah tidak produktif dan harga jualnya tinggi. Lumayan buat nambah usaha yang lain. Pastiya petani beralih ke profesi yang lain karena dia bisa mendapatkan penghasilan dan tidak menanggung resiko”.
(Wawancara , 23/7/2014, di rumahnya).

Sejalan dengan pernyataan di atas, juga disampaikan oleh Bapak H. Muslikh, bahwa kondisi ekonomi pengusaha maupun petani tambak mengalami penurunan dibandingkan sebelumnya. Hal ini sebagaimana pernyataannya di bawah ini:

“Saya merasakan kondisi tambak saat ini jauh dibandingkan dengan yang sebelum-sebelumnya, adanya kebijakan juga tidak mempengaruhi harga pasar dan produksi sehingga pemasukannya tetap. Bahkan untuk proses penebaran benih banyak yang kekurangan modal karena yang dihasilkan sebelumnya tidak seimbang.

Saya juga bingung kenapa kondisi tambak saat ini turun drastis. Selain itu yang tahu banyak lahan tambak milik teman-teman saya yang dijual karena lahannya selalu gagal kalau dibuat budidaya. Setiap tahun produksi menurun sehingga pendapatannya juga pasti menurun". (Wawancara , 21/7/2014 ,di rumahnya)

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa :

- a) Program Minapolitan belum memberikan dampak signifikan dalam meningkatkan produksi perikanan.
- b) Masyarakat petambak masih menggunakan teknik budidaya tradisional, kesuburan lahan menurun, dan kondisi lingkungan (air) yang kurang sehat. Hal ini berakibat tidak adanya peningkatan panen tambak, bahkan berkecenderungan menurun. Sehingga kesejahteraannya tidak meningkat.
- c) Sejauh ini pemerintah telah berupaya untuk mewujudkan tujuan Minapolitan melalui program-program yang diarahkan untuk peningkatan produktifitas dan hasil budidaya tambak khususnya komoditas Bandeng, udang Vannamae, dan udang windu. Namun kondisi tersebut berbanding terbalik dengan apa yang terjadi di Kecamatan

Sidayu sebagai kawasan pengembangan Minapolitan di Kabupaten Gresik.

Kemudian jika dilihat lebih rinci tentang dampak kebijakan Minapolitan di kawasan Minapolitan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat sebagaimana yang dijelaskan oleh Charles T (2001:193) tentang indikator Pembangunan berkelanjutan dalam sektor perikanan diantaranya sebagai berikut:

"(1) Apakah aktivitas tersebut meningkatkan angka lapangan kerja secara jangka panjang dan keseluruhan; (2) Apakah Proyek meningkatkan kelayakan ekonomi dalam sistem lokal dan regional?; dan (3) Apakah ketahanan pangan dan keamanan mata pencaharian secara jangka panjang dapat dipertahankan atau ditingkatkan, sebagaimana diukur baik rata-rata dan minim?"

Jika ditinjau dari indikator sebagaimana yang disampaikan oleh Charles di atas, tentunya keberadaan kebijakan Minapolitan selama ini juga tidak bisa memberikan jawaban positif terhadap pertanyaan tersebut. Hal ini diarekan keberadaan kebijakan Minapolitan yang seharusnya diharapkan mampu meningkatkan lapangan pekerjaan, kelayakan ekonomi secara jangka panjang bagi para nelayan dan masyarakat disekitarnya tidak pernah tercapai. Bahkan yang terjadi adalah

sebaliknya, banyak masyarakat dan petani yang meninggalkan pekerjaan tambak, dan juga mengalami kerugian akibat biaya produksi dan hasil yang didapatkan tidak seimbang.

Hasil temuan di lapangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, tentunya tidak hanya bertolak belakang dengan pendapat dan indikator dari Charles sebagaimana yang disebutkan di atas, namun juga tidak sejalan dengan pendapat dari Djajadiningrat (2005:123) yang menjelaskan bahwa:

“Pembangunan berkelanjutan memerlukan perspektif jangka panjang. Keberlanjutan secara ekonomi dapat dilihat dari ekonomi makro, yang merupakan landasan bagi terselenggaranya berbagai kebijakan pemenuhan hak-hak dasar. Kebijakan ekonomi makro diarahkan pada terwujudnya lingkungan yang kondusif bagi pengembangan usaha, dan terbukanya kesempatan yang luas bagi peningkatan kapabilitas masyarakat miskin. Dalam rangka pemenuhan hak-hak dasar, kebijakan ekonomi makro perlu memperhitungkan empat tujuan yang saling berkaitan, yaitu menjaga stabilitas ekonomi, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, memperluas kesempatan kerja, dan mengurangi kesenjangan antar wilayah”

SIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan Implementasi kebijakan Minapolitan di Kawasan Minapolis Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik tidak berjalan sebagaimana diharapkan sehingga tujuan dan sasaran pengembangan kawasan Minapolitan tidak tercapai. Dalam aspek ekonomi, tidak ada perubahan keadaan pendapatan masyarakat petambak setelah adanya program Minapolitan dibandingkan sebelum adanya program. Hal ini disebabkan karena tidak ada perubahan teknis bertambak dari tradisional ke intensif. Untuk bertambak secara intensif diperlukan tambahan modal dan teknologi serta kompetensi. Program pengembangan kawasan Minapolitan tidak menyediakan pendanaan alternative bukan bank yang bisa mendukung masyarakat petambak untuk mengatasi kebutuhan permodalan sekaligus memfasilitasi perubahan teknis bertambak dari tradisional ke intensif dengan dukungan ketersediaan bibit yang berkualitas. Sehingga produktivitas tambak tidak meningkat bahkan cenderung menurun dari waktu ke waktu.

Oleh karena itu untuk meningkatkan ketercapaian tujuan Minapolitan tidak hanya dilihat dari sejauh mana peningkatan hasil produksi, tetapi juga perlu dipertimbangkan dan disusun program maupun kajian strategis tentang tindak lanjut setelah proses panen bersama dengan *stakeholder* terkait. Adanya

upaya tersebut maka nantinya dapat terwujud industrialisasi hasil perikanan, dan terbedayanya ekonomi masyarakat lokal karena dilibatkan di dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdul_Wahab, Solichin, 1997. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Impelementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Anderson. 1975. *Public Policy Making*. New York: NJ Holt. Reinhartnwinston
- Badan Pusat Statistik. 2011. *Kelautan dan Perikanan Dalam Angka 2011*. BPS : Jakarta.
- BPS Kabupaten Gresik, 2018. *Analisa Indikator Ekonomi dan Sosial Kabupaten Gresik Tahun 2018*; BPS, Gresik.
- BAPPENAS. 2006. *Tema dan Prioritas Pembangunan*. Jakarta : BAPPENAS
- Daryanto, Arief. 2007. *Dari Klaster Menuju Peningkatan Daya Saing Industri Perikanan*. Buletin Craby&Starky, Edisi Januari 2007
- Denscombe, Martyn, 2007. *The Good Research Guide: for small-scale Social Research Project*. Third Edition, Open Universty Press, New York, USA.
- FAO Statistic Division. 2009. *FAO Statistical Yearbook 2009*. FAO : Rome
- Fauzi, Akhmad dan Anna, Suzy, 2006. *Pengelolaan Sumberdaya Perikanan dan Kelautan Untuk Analisis Kebijakan*. Jakarta: Gramedia
- Hanafie, Rita, 2010. *Pengantar Ekonomi Pertanian*. Yogyakarta: Andi Press.
- Kabar Bisnis, 2011. *Gresik pacu produksi perikanan*. Diakses melalui : <http://www.kabarbisnis.com/read/2820220> (26 Mei 2012).
- Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2011. *Kelautan dan Perikanan dalam Angka 2011*. Jakarta : Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- Koncoro, Mudrajat, 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Erlangga, Jakarta.
- Laporan dan Target Pembangunan Sektor Perikanan oleh

- Deputi Bidang SDA
Bappenas, 2005
- Lincoln, Yvona. S dan Guba, Egon,
1985. *Naturalistic Inquiry*.
sage Publication, USA
- Mardiyono, 2014. Pemberdayaan
Industri Kecil berbasis
Potensi Lokal; Kasus
Sanan Malang, *Makalah
Seminar Nasional di FIA
UB, Malang 23 Maret
2014*.
- McNabb, D. E, 2002. *Research
Methods in Public
Administration and
Nonprofit Management:
Quantitative and
Qualitative Approaches*.
Armonk, NY: M. E.
Sharpe.
- Mustafa, A. , I .N. Radiarta ,
Rachmansyah. 2011.
*Profil dan Kesesuaian
Lahan Akuakultur
Mendukung Minapolitan*.
Badan Penelitian dan
Pengembangan Kelautan
dan Perikanan – Pusat
Penelitian dan
Pengembangan
Perikanan Budidaya.
Jakarta: Swakarya
- Permatasar, Lyta, 2011. Strategi
Pengembangan Potensi
Ekonomi Lokal untuk
Pembangunan Daerah,
FOCUS Volume 1,
- Nomor 1, Januari - Juni
2011.
- Pramoda, Armen Zulham, dan Yesi
Dewita Sari, 2013.
Kebijakan Penetapan
Pelabuhan Perikanan
Samudera (PPS) Bitung
Sebagai Kawasan Inti
Minapolitan, *Jurnal
Borneo Administrator /
Volume 9 / No. 1*
- Sutikno dan Maryunani, 2006.
*Ekonomi Sumber Daya
Alam*. Malang: Fakultas
Ekonomi, Universitas
Brawijaya
- Soemarwoto, Otto, 2006.
*Pembangunan
Berkelanjutan: Antara
Konsep dan Realitas*.
Departemen Pendidikan
Nasional Universitas
Padjajaran Bandung.
- Van metter, Donald S. dan Carl Van
Horn. 1975. *The Policy
Implementation Process:
A Conceptual Framework*.
Dalam *Administration and
Society*. Vol. 6. No. 4
- United Nations Headquarters. 2010.
*Sustainable
Development : from
Brundtland to Rio 2012*.
New York : United
Nations Headquarters
- Wibawa, Samodra. 1994. *Kebijakan
Publik*, Intermedia
Jakarta

Wiratam, Adi, 2016. Dampak Implementasi Program Minapolitan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi, *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik* Volume 4, Nomor 3, September - Desember 2016, ISSN 2303 - 341X.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per.12/Men/2010 Tentang Minapolitan dan Nomor 35/2010 tentang Penetapan Kawasan Minapolitan.

Zakiyah, Dwi Maulidatuz, 2014. Pengembangan Perikanan Budidaya: Efektivitas Program Minapolitan dalam Pengelolaan Perikanan Budidaya Berkelanjutan di Kabupaten Gresik, *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota, Planologi Undip*, Volume10 (4):453-465 Desember 2014.